



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT  
DINAS TENAGA KERJA DAN  
PERINDUSTRIAN**



**Rencana Kerja  
Tahun 2025**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dokumen Renca Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanah yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2023-2024, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2023-2024. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan

rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Srategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 040-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Tenaga dan Perindustrian Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat 2025 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan

tugas dan fungsi selama 1 tahun kedepan dengan berpedoman pada. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat beserta seluruh unit kerjanya;
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB.II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terbentuk Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2023 tentang susunan perangkat daerah kabupaten lampung barat. Oleh karena itu pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tidak ada realisasi kegiatan.

#### **2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

REVIU AWAL RKPD						Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif
Kode	Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif					
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000
2.07	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	12,664,500,000	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	12,664,500,000
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar		Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar	

	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	4,964,500,000	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% TPAK		87.02 %	4,964,500,000
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	LB	16 Dokumen	139,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	LB	16 Dokumen	139,000,000
02.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LB	5 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78	LB	5 Dokumen	60,000,000
02.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	LB	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	16	LB	1 Dokumen	10,000,000

02.07.01.2. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000
02.07.01.2. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000

02.07.01.2. 01. 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokumen	60,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokumen	60,000,000
02.07.01.2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokumen	2,535,500,000	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokumen	2,535,500,000
02.07.01.2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000

02.07.01.2. 02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2. 02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000
02.07.01.2. 02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000

02.07.01.2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2. 02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000
02.07.01.2. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000
02.07.01.2. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000

02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31 Paket	645,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31 Paket	645,000,000
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	10,000,000
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1 Paket	150,000,000
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1 Paket	20,000,000
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	100,000,000
02.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2 Paket	80,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2 Paket	80,000,000

02.07.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000
02.07.01.2. 06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000
02.07.01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000
02.07.01.2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000

02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000
02.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000
02.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000
02.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000
02.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	6	Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	LB	6	Unit	200,000,000

							dibayarkan Pajaknya			
02.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2 Unit	10,000,000
02.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5 unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5 unit	60,000,000
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000

02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bernbasis kompetensi pada tahun n	LB	40 Orang	250,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bernbasis kompetensi pada tahun n	LB	40 Orang	250,000,000
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1 Unit	200,000,000
02.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10 IKM	80,000,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10 IKM	80,000,000
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10 IKM	80,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10 IKM	80,000,000
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5 %	350,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5 %	350,000,000

02.07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000
02.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000

02.07.04.2.04	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000
02.07.04.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1 Laporan	100,000,000	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1 Laporan	100,000,000
2.07.05.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1 Laporan	100,000,000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1 Laporan	100,000,000

2.07.05.01. 2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02. 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000

2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000
3.31	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	%				Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000

3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000
3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10	%	200,000,000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10	%	200,000,000

3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10	%	200,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10	%	200,000,000
3.31.03.2.0 1.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tere\integrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahan	Jumlah dokumen verivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1	dokumen	50,000,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tere\integrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahan	Jumlah dokumen verivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1	dokumen	50,000,000

3.31.03.2.0 1.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kemeangan kabupatyen/ Kota	LB	1	Dokumen 80,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kemeangan kabupatyen/ Kota	LB	1	Dokumen 80,000,000
---------------------	---	---	----	---	-----------------------	---	---	----	---	-----------------------

## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten/kota.

**BAB. III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian dan perdagangan, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha perindustrian dan perdagangan kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

**1. Prioritas Nasional**

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan	Sumber	Ket
1	2	3	4
1.	<p>Urusan Wajib Bidang Tenaga kerja</p> <p>1. mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi</p> <p>2. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills</p> <p>3. pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.</p> <p>4. Keempat, mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja</p> <p>5. menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).</p>	<p>Renstra Kementerian Ketenagakerjaan</p>	

	6. meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri		
	7. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik. Kedelapan, peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.		
	8. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.		
2	Urasn Pilihan Bidang Perindustrian	Renstra Kementerian Perindustrian	
	1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri		
	2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri		
	3. Kebijakan pemberdayaan industry		
	4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri produk nasional		
	5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal		
	6. Kebijakan reformasi birokrasi		

## 2. Telaah renstra Provinsi.

### a. Bidang Tenaga Kerja

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang masuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### b. Bidang Perindustrian

1. Peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen
2. Pertumbuhan ekspor melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapainya maka tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah :

**“Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya Pendapatan”**

#### B. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja**

**2. Meningkatnya PDRB Sektor Industri**

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Meningkatkan Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% TPAK	77.01	82.02	87.02	92.02
			PDRB Sektor Industri	360.376	365.544	372.855	380.312
			% TPAK	77.01	82.02	87.02	92.02
			PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	360.376	365.544	372.855	380.312

### 3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang perindustrian yaitu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.07.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
02.07.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
02.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
02.07.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
02.07.01.2.01. 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD
02.07.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.07.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan
02.07.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.07.01.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
02.07.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
02.07.01.2.02. 02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02.07.01.2.02. 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
02.07.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
02.07.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD

02.07.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
02.07.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
02.07.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
02.07.01.2.03. 04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
02.07.01.2.04.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02.07.01.2.04. 04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
02.07.01.2.04. 07	Pendidikan dan Pelatihan Formal
02.07.01.2.04. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu
02.07.01.2.06.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
02.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
02.07.01.2.07.04	Pengadaan Mebel
02.07.01.2.07. 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02.07.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02.07.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02.07.01.2.07.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

	Perorangan
02.07.01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
02.07.01.2.07.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>02.07.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro
02.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
<b>02..07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
02..07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
02..07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi
02..07.03.2.01.02	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota
02..07.03.2.02	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
02..07.03.2.02.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil
<b>02..07.04</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>
02..07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
02..07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja
02..07.04.2.01.02	Perluasan Kesempatan Kerja
02..07.04.2.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
02..07.04.2.02.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
02..07.04.2.03	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota
02..07.04.2.03.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
<b>02..07.05</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>
02..07.05.2.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
02..07.05.2.01.01	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
<b>3.31.02</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industrial</b>
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

	Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat disusun berdasarkan RPJMD 2023-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026. Untuk mencapai target tujuan dan sasaran tersebut maka didukung oleh Program dan kegiatan, berikut target kinerja dan anggaran.

Tabel IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000
2.07	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		87.02 %	12,664,500,000
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar	
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		87.02 %	4,964,500,000
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000
02.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	LB	16 Dokumen	139,000,000

02.07.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LB	5	Dokumen	60,000,000
02.07.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	LB	1	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000
02.07.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.01 .06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokumen	60,000,000
02.07.01.2.02 .	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokumen	2,535,500,000
02.07.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000

02.07.01.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000
02.07.01.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2.05 .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000
02.07.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000
02.07.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000

02.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31	Paket	645,000,000
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1	Paket	10,000,000
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1	Paket	20,000,000
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1	Paket	100,000,000
02.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2	Paket	80,000,000
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000
02.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000
02.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000

02.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000
02.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000
02.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000
02.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000
02.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	6	Unit	200,000,000
02.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2	Unit	10,000,000
02.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5	unit	60,000,000
02.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40	Orang	450,000,000

02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40	Orang	450,000,000
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	LB	40	Orang	250,000,000
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1	Unit	200,000,000
02.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10	IKM	80,000,000
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10	IKM	80,000,000
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5	%	350,000,000
02.07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000
02.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000

02.07.04.2.03 .01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.04	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10	Orang	50,000,000
02.07.04.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10	Orang	50,000,000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.01.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000

2.07.05.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000
2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000
3.31	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000

3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10 %	200,000,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10 %	200,000,000
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahaan	Jumlah dokumen verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1 dokumen	50,000,000
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan kabupaten/ Kota	LB	1 Dokumen	80,000,000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustriandi Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dokumen Renca Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 sebagai sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan amanah yang diemban Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

Pada Rancangan Akhir RPJMD 2023-2024, kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat diwujudkan dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah yakni meningkatnya nilai investasi daerah, meningkatnya kuantitas penyerapan tenaga kerja, dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan. Dengan penetapan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 perlu dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah, demikian juga Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Lampung Barat berkewajiban menyusun terhadap Rencana Strategis tahun 2023-2024. Rencana Strategis Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Bab I, Pasal 1 butir 29, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini didasari Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan

rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-PD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja PD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Srategis Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentangTata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 040-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Tenaga dan Perindustrian Kerja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun untuk memberikan tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Maksud disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat 2025 adalah sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan

tugas dan fungsi selama 1 tahun kedepan dengan berpedoman pada. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

1. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat;
2. Menjadi acuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat beserta seluruh unit kerjanya;
3. Merupakan bahan acuan bagi para pemangku kepentingan yang terkait bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan dalam mengambil keputusan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENJA ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB.II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Terbentuk Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2023 tentang susunan perangkat daerah kabupaten lampung barat. Oleh karena itu pada tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tidak ada realisasi kegiatan.

#### **2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut :

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat  
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

REVIU AWAL RKPD						Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif
Kode	Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif					
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000
2.07	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	12,664,500,000	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	12,664,500,000
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar		Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar	

	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		5 %	4,964,500,000	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% TPAK		87.02 %	4,964,500,000
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	LB	16 Dokumen	139,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	LB	16 Dokumen	139,000,000
02.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LB	5 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78	LB	5 Dokumen	60,000,000
02.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	LB	1 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	16	LB	1 Dokumen	10,000,000

02.07.01.2. 01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000
02.07.01.2. 01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2. 01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000

02.07.01.2. 01. 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokume n	1,000,000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokume n	60,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokumen	60,000,000
02.07.01.2. 02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokume n	2,535,500,000	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokumen	2,535,500,000
02.07.01.2. 02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000

02.07.01.2. 02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2. 02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2. 02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000
02.07.01.2. 02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000

02.07.01.2. 02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2. 02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2. 05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000
02.07.01.2. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000
02.07.01.2. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000

02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31 Paket	645,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31 Paket	645,000,000
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	10,000,000
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1 Paket	150,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1 Paket	150,000,000
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1 Paket	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1 Paket	20,000,000
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1 Paket	100,000,000
02.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2 Paket	80,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2 Paket	80,000,000

02.07.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000
02.07.01.2. 06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000
02.07.01.2. 06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000
02.07.01.2. 07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000

02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000
02.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000
02.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000
02.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000
02.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	6	Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	LB	6	Unit	200,000,000

							dibayarkan Pajaknya			
02.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2 Unit	10,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2 Unit	10,000,000
02.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5 unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5 unit	60,000,000
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1 Dokumen	60,000,000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1 Dokumen	60,000,000
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000

02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40 Orang	450,000,000
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bernbasis kompetensi pada tahun n	LB	40 Orang	250,000,000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bernbasis kompetensi pada tahun n	LB	40 Orang	250,000,000
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1 Unit	200,000,000
02.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10 IKM	80,000,000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10 IKM	80,000,000
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10 IKM	80,000,000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10 IKM	80,000,000
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5 %	350,000,000	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5 %	350,000,000

02.07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000
02.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000

02.07.04.2.04	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000
02.07.04.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10 Orang	50,000,000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1 Laporan	100,000,000	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1 Laporan	100,000,000
2.07.05.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1 Laporan	100,000,000	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1 Laporan	100,000,000

2.07.05.01. 2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02. 01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000

2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000
3.31	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	%				Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000

3.31.02.2.0 1.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000
3.31.02.2.0 1.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000
3.31.02.2.0 1.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000
3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10	%	200,000,000	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10	%	200,000,000

3.31.03.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10	%	200,000,000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10	%	200,000,000
3.31.03.2.0 1.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tere\integrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahan	Jumlah dokumen verivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1	dokumen	50,000,000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tere\integrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahan	Jumlah dokumen verivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1	dokumen	50,000,000

3.31.03.2.0 1.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kemeangan kabupatyen/ Kota	LB	1	Dokumen	80,000,000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kemeangan kabupatyen/ Kota	LB	1	Dokumen	80,000,000
---------------------	---	---	----	---	---------	------------	---	---	----	---	---------	------------

## **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pekon, kecamatan dan kabupaten/kota.

**BAB. III**  
**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Analisis renstra K/L dan PD Kabupaten/Kota ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan renstra PD Kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing PD. Hal tersebut diatas perlu perbaikan lingkungan usaha yang kondusif bagi peningkatan daya saing Perindustrian dan perdagangan, dan perlu juga dilakukan peningkatan akses usaha perindustrian dan perdagangan kepada sumber daya produktif, kompetensi dan produktifitas usahanya.

**1. Prioritas Nasional**

Kebijakan masing-masing kementerian yang menangani urusan Tenaga Kerja dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut :

Identifikasi Kebijakan Nasional

No	Kebijakan	Sumber	Ket
1	2	3	4
1.	<p>Urusan Wajib Bidang Tenaga kerja</p> <p>1. mengembangkan pasar kerja terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi</p> <p>2. meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial (pendidikan vokasi) dan soft skills</p> <p>3. pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (lembaga kursus/komunitas) bagi kelompok berpendidikan rendah.</p> <p>4. Keempat, mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja</p> <p>5. menguatkan relevansi dunia pendidikan dan dunia kerja, baik dari kurikulum, pendidik, sarana dan prasarana, metode pembelajaran, hingga sertifikasi keahlian (SKKNI).</p>	<p>Renstra Kementerian Ketenagakerjaan</p>	

	6. meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri		
	7. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik. Kedelapan, peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.		
	8. peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.		
2	Urasn Pilihan Bidang Perindustrian	Renstra Kementerian Perindustrian	
	1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri		
	2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri		
	3. Kebijakan pemberdayaan industry		
	4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri produk nasional		
	5. Kebijakan fasilitas fiskal dan nonfiskal		
	6. Kebijakan reformasi birokrasi		

## 2. Telaah renstra Provinsi.

### a. Bidang Tenaga Kerja

1. Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang masuk program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

### b. Bidang Perindustrian

1. Peningkatan pemahaman dan ketaatan para stakeholder terhadap peraturan Perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen
2. Pertumbuhan ekspor melalui pembinaan dan dukungan bagi pelaku ekspor

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

#### A. TUJUAN

Mengacu kepada sasaran yang termuat dalam RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk mencapainya maka tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah :

**“Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Meningkatnya Pendapatan”**

#### B. SASARAN

Adapun sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan di atas adalah sebagai berikut :

**1. Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja**

**2. Meningkatnya PDRB Sektor Industri**

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 16. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% TPAK	77.01	82.02	87.02	92.02
			PDRB Sektor Industri	360.376	365.544	372.855	380.312
			% TPAK	77.01	82.02	87.02	92.02
			PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	360.376	365.544	372.855	380.312

### 3.3 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari RPD Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi di bidang pangan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian pada satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang tenaga kerja dan urusan pilihan bidang perindustrian yaitu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.07.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
02.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
02.07.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
02.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
02.07.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD
02.07.01.2.01. 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD
02.07.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
02.07.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan
02.07.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
02.07.01.2.02. 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
02.07.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
02.07.01.2.02. 02	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
02.07.01.2.02. 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
02.07.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
02.07.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD

02.07.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran
02.07.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
02.07.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
02.07.01.2.03. 04	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
02.07.01.2.04.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
02.07.01.2.04. 04	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
02.07.01.2.04. 07	Pendidikan dan Pelatihan Formal
02.07.01.2.04. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu
02.07.01.2.06.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
02.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
02.07.01.2.07.04	Pengadaan Mebel
02.07.01.2.07. 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
02.07.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
02.07.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
02.07.01.2.07.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
02.07.01.2.07.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan

	Perorangan
02.07.01.2.07.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
02.07.01.2.07.07	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>02.07.02.</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro
02.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
<b>02..07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>
02..07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
02..07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi
02..07.03.2.01.02	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota
02..07.03.2.02	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
02..07.03.2.02.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil
<b>02..07.04</b>	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>
02..07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
02..07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja
02..07.04.2.01.02	Perluasan Kesempatan Kerja
02..07.04.2.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
02..07.04.2.02.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
02..07.04.2.03	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota
02..07.04.2.03.01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja
<b>02..07.05</b>	<b>Program Hubungan Industrial</b>
02..07.05.2.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
02..07.05.2.01.01	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
<b>3.31.02</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industrial</b>
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri

	Kabupaten/Kota
3.31.02.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat disusun berdasarkan RPJMD 2023-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2023-2026. Untuk mencapai target tujuan dan sasaran tersebut maka didukung oleh Program dan kegiatan, berikut target kinerja dan anggaran.

Tabel IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kode	Tujuan / Sasaran / Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/sasaran Program/Kegiatan /sub kegiatan	Lokasi	Target 2025	Pagu Indikatif
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				12,664,500,000
2.07	Bidang Tenaga Kerja				12,664,500,000
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		87.02 %	12,664,500,000
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri		372855 Milyar	
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja		87.02 %	4,964,500,000
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855 Milyat	7,700,000,000
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	LB	80 %	4,004,500,000
02.07.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	LB	16 Dokumen	139,000,000

02.07.01.2.01 .01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	LB	5	Dokumen	60,000,000
02.07.01.2.01 .02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	LB	1	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.01 .03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	LB	1	Dokumen	5,000,000
02.07.01.2.01 .04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2.01 .05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.01 .06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LB	1	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LB	6	dokumen	60,000,000
02.07.01.2.02 .	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	LB	43	Dokumen	2,535,500,000
02.07.01.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	LB	12	Bulan	2,500,000,000

02.07.01.2.02 .03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	LB	12	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	1	Dokumen	2,500,000
02.07.01.2.02 .06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	LB	3	Dokumen	10,000,000
02.07.01.2.02 .07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LB	2	Dokumen	1,000,000
02.07.01.2.02 .08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	LB	1	Dokumen	2,000,000
02.07.01.2.05 .	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	LB	33	Dokumen	90,000,000
02.07.01.2.05 .05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	LB	22	Dokumen	50,000,000
02.07.01.2.05 .09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	LB	4	Orang	40,000,000

02.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum		31	Paket	645,000,000
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	LB	1	Paket	10,000,000
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	LB	1	Paket	20,000,000
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	LB	1	Paket	100,000,000
02.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	LB	2	Paket	80,000,000
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	LB	1	Paket	60,000,000
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	LB	12	Laporan	25,000,000
02.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	LB	12	Laporan	200,000,000
02.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	1	Paket	150,000,000
02.07.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	1.00	Paket	150,000,000

02.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	36	Laporan	175,000,000
02.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	12	Laporan	5,000,000
02.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	20,000,000
02.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	12	Laporan	150,000,000
02.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	LB	13	Unit	270,000,000
02.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	LB	6	Unit	200,000,000
02.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	LB	2	Unit	10,000,000
02.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	LB	5	unit	60,000,000
02.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	LB	1	Dokumen	60,000,000
02.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40	Orang	450,000,000

02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	LB	40	Orang	450,000,000
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	LB	40	Orang	250,000,000
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	LB	1	Unit	200,000,000
02.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	LB	10	IKM	80,000,000
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	LB	10	IKM	80,000,000
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	LB	5	%	350,000,000
02.07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	LB	335	Orang	200,000,000
02.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	LB	330	Orang	100,000,000

02.07.04.2.03 .01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	LB	330	Orang	100,000,000
02.07.04.2.04	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	LB	10	Orang	50,000,000
02.07.04.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	LB	10	Orang	50,000,000
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.01.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	LB	1	Laporan	100,000,000
2.07.05.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	LB	1	Laporan	100,000,000

2.07.05.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	LB	1	Perkara	100,000,000
2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	LB	2	Lembaga	100,000,000
3.31	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)		372,855	Milyar	7,700,000,000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat		8	%	7,500,000,000
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun		4	%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	LB	3	Dokumen	7,500,000,000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	LB	1	Dokumen	2,000,000,000
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	LB	1	Dokumen	5,000,000,000
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	LB	1	Dokumen	500,000,000

3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuhan IKM formal	LB	10 %	200,000,000
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	LB	10 %	200,000,000
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewenangan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusahaan	Jumlah dokumen verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	LB	1 dokumen	50,000,000
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan kabupaten/ Kota	LB	1 Dokumen	80,000,000

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Program unggulan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, serta mengakomodir penyelesaian masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat.

Keberhasilan pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustrian Lampung Barat tidak terlepas dari dukungan pendanaan, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Pendanaan tersebut merupakan stimulator (pengungkit) untuk tumbuhnya investasi swasta dan swadaya masyarakat yang bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.

Agar Rencana Kerja yang telah disusun ini dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Tenaga Kerja dan Perindustriandi Kabupaten Lampung Barat, maka dalam implementasinya perlu komitmen, semangat, kemauan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lampung Barat saja tetapi oleh segenap *stakeholder* baik pusat, provinsi maupun yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. LAMPUNG BARAT  
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN</b>						<b>11.980.048.600,00</b>							<b>13.949.000.000,00</b>		
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						<b>3.630.048.600,00</b>							<b>5.349.000.000,00</b>		
	<b>2.07</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>						<b>3.630.048.600,00</b>							<b>5.349.000.000,00</b>		
1.	<b>2.07.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<i>Nilai SAKIP</i>	-			<b>80 %</b>	<b>2.339.201.000,00</b>						-	<b>3.899.000.000,00</b>		
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</i>	-				16 Dokumen	138.590.000,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Su mberdaya Manusia	Aparatur	-	189.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>					5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Su mberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	9.590.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Su mberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>					1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Su mberdaya Manusia	Aparatur		5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				6 Laporan	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-			43 Dokumen	1.247.496.500,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	2.535.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				12 Orang/bulan	1.216.496.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>				3 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	-			1 Dokumen	89.035.000,00			-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	90.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				22 Dokumen	49.035.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				4 Orang	40.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah paket penyediaan administrasi umum</i>	-			31 Paket	590.432.000,00			-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	625.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				4 Paket	118.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	80.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				1 Dokumen	57.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung jawaban Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	32.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</i>	-			13 Unit	130.572.500,00			-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				11 Unit	67.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	13.460.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	49.962.500,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	<b>2.07.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<i>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	-			<b>1 Dokumen</b>	<b>262.730.000,00</b>						-	<b>250.000.000,00</b>	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<i>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>	-			1 Dokumen	262.730.000,00			-	Penanggungangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur	-	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen	262.730.000,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
3.	<b>2.07.03</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b><i>Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi</i></b>	-			<b>40 Orang</b>	<b>483.823.100,00</b>						-	<b>650.000.000,00</b>	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<i>Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi</i>	-			40 Orang	483.823.100,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja	-	650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				40 Orang	402.454.700,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				1 Unit	81.368.400,00	Kab. Lampung Barat, Balik Bukit, Wates	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
4.	<b>2.07.04</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b><i>Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal</i></b>	-			<b>5 %</b>	<b>380.020.500,00</b>						-	<b>350.000.000,00</b>	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatkan pelayanan perluasan kesempatan kerja</i>	-			335 Orang	209.445.500,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>				335 Orang	135.490.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				100 Orang	73.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<i>Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair</i>	-			335 Orang	68.391.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja	-	100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				330 Orang	68.391.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>	-			40 Orang	102.184.000,00			-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja	-	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				40 Orang	102.184.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggulangan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	<i>Meningkatnya Perlindungan tenaga Kerja</i>	-			1 Laporan	164.274.000,00						-	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-			1 Laporan	53.122.500,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	53.122.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		60.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	-			1 Laporan	111.151.500,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja	-	140.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				1 Perkara	68.902.500,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				2 Lembaga	42.249.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Tenaga Kerja		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.350.000.000,00							8.600.000.000,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						8.350.000.000,00							8.600.000.000,00	
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	-			8 % 4 %	8.250.000.000,00						-	8.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri</i>	-			3 Dokumen	8.250.000.000,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-	-	8.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>				1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>				1 Dokumen	6.850.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		7.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i>				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	-		1.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b><i>Persentase pertumbuhan IKM formal</i></b>	-			10 %	100.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan</i>	-			10 %	100.000.000,00			-	Penanggung angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia	Aparatur dan Masyarakat	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lampung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Penanggul angan Kemiskinan 2. Meningkatkan kualitas Su mberdaya Manusia	Aparatur dan Masyarakat		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
<b>J U M L A H</b>								<b>11.980.048.600,00</b>							<b>13.949.000.000,00</b>	

LAMPIRAN II  
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
02.	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						12.664.500.000							12.664.500.000	Disnakerprin
2,07	Bidang Tenaga Kerja						12.664.500.000							12.664.500.000	
	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	15 %	83.48 %	83.48 %	87.02 %	12.664.500.000			√			92.02 %	12.664.500.000	
	Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Koprasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Peningkatan Perkapita	PDRB Sektor Industri	380.312 Milyar	360.376 Milyar	365.544 Milyar	372855 Milyar				√			380312 Milyar		
	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja	% Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang bekerja	15 %	83.48 %	83.48 %	87.02 %	4.964.500.000			√			92.02 %	4.964.500.000	
	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	380.312 Milyar	360.376	360.376 Milyar	372.855 Milyat	7.700.000.000				√		380.312 Milyar	7.700.000.000	
02.07.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP	80 %		78 %	80 %	4.004.500.000	Lampung barat	APBD LB		√	Apartur	80 %	4.004.500.000	Disnakerprin
02.07.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	48 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	139.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Apartur	16 Dokumen	139.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Apartur	5 Dokumen	60.000.000	Disnakerprin

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023		Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024		Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
				Target 2025		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Nasional	Daerah						
02.07.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3 Dokumen	0Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	10.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	5.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	2.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	1.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.01. 06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	1.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	6 dokumen	6 dokumen	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	6 dokumen	60.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan	jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129 Dokumen	Dokumen Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	2.535.500.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	43 Dokumen	2.535.500.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang Bulan	Bulan Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2.500.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12 Bulan	2.500.000.000	Disnakerprin		

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab	
						Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
02.07.01.2.02. 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	Dokumen Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12 Dokumen	10.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	Dokumen Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12 Dokumen	10.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	Dokumen Dokumen	1 laporan	1 Dokumen	2.500.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	2.500.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Dokumen	Dokumen Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	3 Dokumen	10.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	Dokumen Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	2 Dokumen	1.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	Dokumen Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	2.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	99 Dokumen	Dokumen Dokumen	33 Dokumen	33 Dokumen	90.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	33 Dokumen	90.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	66 Dokumen	Dokumen Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	50.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	22 Dokumen	50.000.000	Disnakerprin	
02.07.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	Orang Orang	4 Orang	4 Orang	40.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	4 Orang	40.000.000	Disnakerprin	

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026		Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023		Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024		Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab		
									Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas						
														Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif	
02.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket penyediaan administrasi umum	93	Paket	Paket	Paket	31	Paket	31	Paket	645.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	31	Paket	645.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	Jenis	Jenis	1	Paket	1	Paket	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	10.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Tersedia	3	Paket	Paket	Paket	1	Paket	1	Paket	150.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	150.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	- Paket	- Paket	1	Paket	1	Paket	20.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	20.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	0 Paket	5 Paket	1	Paket	1	Paket	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	100.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6	Paket	0 Paket	10 Paket	2	Paket	2	Paket	80.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	2	Paket	80.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3	Paket	Paket	Paket	1	Paket	1	Paket	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	60.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	Bulan	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	25.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12	Laporan	25.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	Bulan	Bulan	12	Laporan	12	Laporan	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12	Laporan	200.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	3	Paket	-	-	1	Unit	1	Paket	150.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	150.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	3	Paket	-	-	1	Unit	1,00	Paket	150.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1	Paket	150.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108	Laporan	Bulan	Bulan	36	Laporan	36	Laporan	175.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	36	Laporan	175.000.000	Disnakerprin
02.07.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	36	Laporan	Laporan	laporan	12	Laporan	12	Laporan	5.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12	Laporan	5.000.000	Disnakerprin

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023		Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024		Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
													Nasional		Daerah	Target	
02.07.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	36 Laporan	Bulan Bulan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12 Laporan	20.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	36 Laporan	Bulan Bulan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	12 Laporan	150.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	27 Unit	Unit Unit	13 Unit	13 Unit	270.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	13 Unit	270.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	Unit Unit	6 Unit	6 Unit	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	6 Unit	200.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Unit Unit	2 Unit	2 Unit	10.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	2 Unit	10.000.000	Disnakerprin		
02.07.01.2.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	- -	5 unit	5 unit	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	5 unit	60.000.000	Disnakerprin		
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4 Dokumen	"- Dokumen "- Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	60.000.000	Disnakerprin		
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	4 Dokumen	- Dokumen - Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	60.000.000	Disnakerprin		
02.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	4 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apartur	1 Dokumen	60.000.000	Disnakerprin		
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	120 Orang		40 Orang	40 Orang	450.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Angkatan Kerja	40 Orang	450.000.000	Disnakerprin		
02.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	120 Orang		40 Orang	40 Orang	450.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Angkatan Kerja	40 Orang	450.000.000	Disnakerprin		
02.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kopetensi	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan bernbasis kompetensi pada tahun n	120 Orang		40 Orang	40 Orang	250.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Angkatan Kerja	40 Orang	200.000.000	Disnakerprin		

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
02.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur	1 Unit	250.000.000	Disnakerprin
02.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang ditingkatkan Produktivitasnya	60 ikm		10 IKM	10 IKM	80.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	UKM	10 IKM	80.000.000	Disnakerprin
02.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	60 ikm		10 IKM	10 IKM	80.000.000	Lampung barat	APBD LB		v		10 IKM	80.000.000	Disnakerprin
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal	15 %		5 %	5 %	350.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	5 %	350.000.000	Disnakerprin
02.07.04.2.01	Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja	1005 Orang		330 Orang	335 Orang	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	340 Orang	200.000.000	Disnakerprin
02.07.04.2.01.01	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	1005 Orang		330 Orang	330 Orang	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	330 Orang	100.000.000	Disnakerprin
02.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan tenaga kerja	1005 Orang		330 Orang	330 Orang	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	330 Orang	100.000.000	Disnakerprin
02.07.04..2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair	1005 Orang		330 Orang	330 Orang	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	340 Orang	100.000.000	Disnakerprin
02.07.04.2.03.01	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1005 Orang		330 Orang	330 Orang	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	330 Orang	100.000.000	Disnakerprin

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab	
						Target 2025		Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Nasional					Daerah
02.07.04.2.04	Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) didaerah kab/kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	30 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	10 Orang	50.000.000	Disnakerprin	
02.07.04.2.04	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja	Jumlah CPMI dan PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	90 Orang		10 Orang	10 Orang	50.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	10 Orang	50.000.000	Disnakerprin	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		v	Apatur dan Nagkatan Kerja	1 Laporan	100.000.000	Disnakerprin	
2.07.05.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Lampung barat	APBD LB				1 Laporan	100.000.000		
2.07.05.01.2.01	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Lampung barat	APBD LB				1 Laporan	100.000.000		
2.07.05.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina dan Perselisihan yang dicegah	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Lampung barat	APBD LB				1 Laporan	100.000.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2.07.05.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2 Perkara			1 Perkara	100.000.000	Lampung barat	APBD LB				1 Perkara	100.000.000	
2.07.05.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	6 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	100.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Apartur dan Nagkatan Kerja	2 Lembaga	100.000.000	Disnakerprin
3.31	Meningkatnya PDRB Sektor Industri	PDRB Sektor Industri (milyar rupiah)	380.312 Milyar	365.544 Milyar	365.544 Milyar	372.855 Milyar	7.700.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	380312	7.700.000.000	Disnakerprin
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	12 %		4 %	8 %	7.500.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	12 %	7.500.000.000	Disnakerprin
		Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	6 %		4 %	4 %					V		6 %		
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan pemberdayaan Industri	9 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	3 Dokumen	7.500.000.000	Disnakerprin
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	1 Dokumen	2.000.000.000	Disnakerprin
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	1 Dokumen	5.000.000.000	Disnakerprin
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	Lampung barat	APBD LB		V	Aparatur dan UMKM	1 Dokumen	500.000.000	Disnakerprin

Kode	Urusan / Bidang Urusan/Tujuan / Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Progr am/Kegiatan /sub kegiatan	Target Akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2026	Realisasi Capain Kinerja Tahun 2023	Perkiraan Capain Target Renja Tahun 2024	Capain Kinerja dan Krangka Pendanaan 2025						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD Penanggung Jawab
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Persentase pertumbuh an IKM formal	30 %		10 %	10 %	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Aparatur dan UMKM	10 %	200.000.000	Disnakerprin
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota	Persentase jumlah izin yang di terbitkan Usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang di terbitkan	30 %		10 %	10 %	200.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Aparatur dan UMKM	10 %	200.000.000	Disnakerprin
3.31.03.2.01.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUL, IUKI dan IPKI Kewengan kabupaten / kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang tereintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah dokumen verivikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan / atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah dan tinggi	3 Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Aparatur dan UMKM	1 dokumen	50.000.000	Disnakerprin
3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	Lampung barat	APBD LB		√	Aparatur dan UMKM	1 Dokumen	80.000.000	Disnakerprin